

KONSEP HUBBUL WATHAN MINAL IMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI RUH NASIONALISME

Hamidulloh Ibda

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama
(STAINU) Temanggung
h.ibdaganteng@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep *Hubbul Wathan Minal Iman* dan nasionalisme dalam pendidikan Islam. Selain itu juga mendeskripsikan genealogi nasionalisme dan *Hubbul Wathan Minal Iman*, dinamika kelompok antinasionalisme, dan karakter nasionalisme dalam pendidikan Islam. Temuan dalam artikel ini menunjukkan karakter nasionalisme sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa, salah satunya melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang ditetapkan pemerintah. Dalam program itu, terdapat karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air sebagai wujud *Hubbul Wathan Minal Iman* yang bisa diterapkan semua lembaga pendidikan Islam untuk menjaga ruh nasionalisme.

Kata kunci: *Hubbul Wathan Minal Iman*, Pendidikan Islam, Nasionalisme

ABSTRACT

This article aims to find out the concept of Hubbul Wathan Minal Iman and nationalism in Islamic education. It also describes the genealogy of nationalism and Hubbul Wathan Minal Iman, the dynamics of the anti-nationalism group, and the character of nationalism in Islamic education. The findings in this article indicate the character of nationalism is very influential on the resilience of the nation, one of them through the program strengthening character education established by the government. In that program, there is a character of the spirit of nationalism and love of the homeland as a form of

Hubbul Wathan Minal Iman that can be applied by all Islamic educational institutions to maintain the spirit of nationalism.

Keywords: *Hubbul Wathan Minal Iman, Islamic Education, Nationalism*

A. Pendahuluan

Bangsa besar adalah yang menjunjung tinggi nasionalisme, nilai-nilai, spirit kebangsaan dan agama. Dalam konteks Indonesia, nasionalisme menjadi harga mati karena menjadi wujud kepatuhan terhadap dasar-dasar negara, konstitusi sekaligus representasi kepatuhan beragama. Menjadi nasionalis merupakan bukti orang beragama secara kafah. Sebab, beragama dan bernegara bisa berjalan dalam waktu bersamaan dan tidak harus dipisah. Menjadi religius bisa sekaligus menjadi seorang nasionalis, begitu sebaliknya.

Dalam konteks Indonesia, tidak perlu ada pembedaan dan pemisahan antara agama dan negara. Beragama dan bernegara bisa senada dan seirama. Semuanya itu sudah dirangkum dalam butir-butir Pancasila yang menampung semua perbedaan dan kepentingan. Indonesia merupakan negara yang berbeda dengan negara lain karena mampu menggabungkan spirit kebangsaan dengan agama. Artinya, tidak semua negara memiliki konsep kenegaraan ideal yang di dalamnya menampung semua kepentingan dan perbedaan. Indonesia yang beragam suku, agama, ras, warna kulit, bahasa dan budaya bisa bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan spirit nasionalisme.

Banyaknya kelompok yang belakangan secara tegas ingin mengubah dasar negara menjadi bukti mereka “gagal paham” terhadap nasionalisme dan agama mereka. Mereka lantang meneriakan bahwa nasionalisme adalah kafir, Pancasila itu taghut, hormat bendera haram, menyanyikan lagu Indonesia Raya kafir dan lainnya. Gerakan dan ujaran seperti ini menjadi berbahaya karena tujuannya menggembosi spirit nasionalisme yang puncaknya pada kehancuran bangsa.

Pertentangan antara nasionalisme dan spirit keagamaan makin kacau karena ditunggangi kepentingan politik. Ditambah benturan suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Adanya kelompok pengusung spirit “negara Islam” justru memperkeruh kondisi bangsa. Padahal memegang nasionalisme dan

Pancasila sudah sangat islami dan bukan pula melenceng dari substansi Islam itu sendiri.

Adanya kelompok radikal, konservatif, kaku, yang ingin menegakkan khilafah, negara Islam dan sistem syariah sebenarnya harus dikaji lebih dalam. Mereka mempertentangkan nasionalisme dan Islam yang hakikatnya bisa bersatu. Hal itu membuktikan kesempitan berpikir dan mentalitas luar pagar yang tidak memahami Indonesia secara utuh.

Indonesia terdiri atas berbagai macam unsur yang membentuknya, yaitu suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan serta agama yang secara keseluruhan adalah suatu kesatuan. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila sebagai suatu negara kesatuan seperti penjelasan dalam Pembukaan UUD 1945 (Kaelan 2016, 143). Jika ada kelompok yang menolak Pancasila dan NKRI, maka sama saja mereka mengkhianati sejarah, filosofi, dan konstitusi Indonesia.

Dari penjelasan Huda (2010) dan Kaelan (2016) di atas, golongan yang antinasionalisme tidak bisa dibiarkan karena bertentangan dengan pilar bangsa. Sebab, Indonesia dengan Arab, Mesir, Yaman, jelas berbeda. Di Nusantara ini, tidak ada yang urgen untuk mendirikan negara Islam, *daulah islamiyah*, *Islamic state* atau pun khilafah. Sebab, hukum Islam tidak bergantung pada adanya suatu negara, melainkan masyarakat dapat memberlakukan hukum agama dalam sebuah negara berbentuk apa saja.

Jadi tidak ada keharusan bagi Indonesia diubah menjadi khilafah, Negara Islam Indonesia, Indonesia Syariah atau sejenisnya. Sebab, yang ditonjolkan seharusnya nilai-nilai, substansi, ruh dan ajarannya, bukan Islam dijadikan sebuah negara. Hal ini membuktikan patologi dan anomali sosial yang makin akut. Apalagi, fakta di lapangan membuktikan sejumlah ormas pengusung khilafah bukan mengusung gerakan Islam secara ramah dan damai, melainkan konstitusi mereka justru adalah gerakan politik yang ingin merebut kekuasaan yang akhirnya melahirkan tindakan radikal dan suka menyalahkan kelompok lain.

B. Pembahasan

1. Genealogi Nasionalisme

Gagasan nasionalisme sebenarnya juga hadir di negara-negara di Timur Tengah yang belakangan diidentikkan dengan negara khilafah.

Padahal secara historis, gagasan nasionalisme sudah tumbuh sejak dulu sebelum ada negara Islam yang digaungkan di Indonesia dewasa ini.

Nasionalisme akar katanya adalah *nation* yang artinya bangsa (Yatim 1999, 57). Sementara (Moesa 2007, 28), menjelaskan terminologi nasionalisme, *natie*, *national*, semuanya akarnya dari bahasa latin, yaitu *natio* yang artinya bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Kata *natio* ini berasal dari kata *nascie* yang berarti dilahirkan.

Di Indonesia, nasionalisme secara umum terbagi atas dua aspek, yaitu nasionalisme Islam dan nasionalisme kebudayaan. Salah satu pelopor nasionalisme kebudayaan adalah Budi Utomo (BU). Budi Utomo merupakan organisasi pemuda yang didirikan Dr. Soetomo dan sejumlah mahasiswa STOVIA yaitu Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908 yang digagaskan Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Lahirnya Budi Utomo berawal dari politik etis Belanda yang ingin “membalas budi” terhadap jajahannya, Indonesia (dicetuskan 1901) yang membuka pintu bangsa Indonesia untuk meraih pendidikan modern. Kemunculan Budi Utomo menjadi awal berbagai aspirasi dalam pergerakan bangsa menghadapi penjajahan. Para pendiri BU mayoritas beragama Islam dan sering disebut golongan Priyayi Jawa (Sitompul 2010, 41).

Selain Budi Utomo, ada juga organisasi yang mengungus nasionalisme berbasis pemurnian Islam, yaitu Syarikat Islam (SI). Organisasi SI yang dulu bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) didirikan Haji Samanhudi pada 16 Oktober 1905. SDI merupakan organisasi pertama kali lahir di Indonesia, pada awalnya organisasi yang dibentuk Haji Samanhudi dan kawan-kawan ini merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu.

Sarekat Islam pada tahun 1912 yang menitikberatkan pada hubungan spiritual agama dan perdagangan yang berkembang menjadi gerakan nasionalisme rakyat yang pertama di Indonesia. SI pecah menjadi dua, yaitu SI putih yang mengutamakan idiologi Islam dan Pan Islamisme, dan SI merah di bawah Semaun, Darsono, dan Tan Malaka yang cenderung ke kiri, yang akhirnya menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berpegang pada sosialisme, internasionalisme dan menganggap

nasionalisme sebagai musuh. Pada waktu dirinya merasa kuat, PKI melakukan pemberontakan pada 13 November 1926, tetapi kalah dan dibubarkan pemerintah kolonial. Pada 25 Desember 1912 lahir partai yang berjiwa nasionalis yaitu Indische Partij yang didirikan oleh Douwes Dekker, tetapi tidak mendapat sambutan rakyat. Pada 4 Juli 1927 Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merupakan wadah nasionalisme modern yang radikal. Ideologi partai tersebut nasional radikal, yang dalam pandangan Bung Karno dianggap kekuatan bangsa Indonesia terletak pada Nasionalisme, Islamisme dan Komunisme (NASAKOM). Setelah itu, diikuti kelahiran banyak organisasi, baik yang bercorak keagamaan, politik maupun kepemudaan, seperti Muhammadiyah (18 November 1912), Nahdlatul Ulama (31 Januari 1926), Christelijke Ethische Partij (1916), Indische Katholieke Partij (1918), Jong Java (1915), Jong Sumatera Bond (1917), dan lainnya.

Lahirnya beraneka ragam organisasi itu dapat dikatakan nasionalisme sudah mulai tumbuh karena senasib sepenenderitaan, yang menginginkan bebas dari penjajahan Belanda, dan ingin mewujudkan cita-cita yaitu masa depan lebih baik, yang oleh Anderson disebut *Imagined Political Community*. Nasionalisme mencapai puncaknya saat dibentuknya BPUPKI pada 1 Maret 1945. Organisasi bentukan pemerintah Jepang itu beranggotakan 60 orang. Pada awalnya yang akan menjadi ketua Ir. Soekarno, tetapi dengan alasan tertentu akhirnya ditunjuklah Radjiman Wediodiningrat sebagai ketua dengan wakilnya R.P. Soeroso, tujuannya pembentukannya adalah untuk menyelidiki dan mempelajari hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka (Murod 2011, 48–49).

Dari penjelasan ini, nasionalisme sudah menggaung dari berbagai organisasi atau kelompok yang intinya sama, ingin mengusir penjajah. Akan tetapi, SI bercorak berbeda dengan Budi Utomo sehingga dalam sejarah yang dianggap pencetus nasionalisme kebudayaan adalah BU, sementara SI pencetus nasionalisme yang membahayakan negara saat itu karena dianggap terlalu kiri dan menjadi embrio PKI yang terlarang.

Dalam *Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila* Sitompul (2010) menjelaskan bahwa Roeslan Abdulgani (1914-2005) menyebut Budi Utomo adalah pengusung nasionalisme kebudayaan

(*cultural nationalism*). Sedangkan SI adalah nasionalisme politik religius (*religious-political nationalism*).

Sementara pendapat lain, menyebut SI sebagai kaum nasionalis muslim (*muslim nationalist*) dan BU sebagai nasionalis yang tidak acuh agama (*religiously indifferent nationalism*). Keduanya menekankan corak nasionalisme berlandaskan Islam, meskipun BU lebih menonjol aspek kebudayaannya (Poespoprodjo 1984, 55–56).

Secara umum, nasionalisme yang dikonsepsi dengan idiom “nasionalisme” memang berawal dari gerakan pembaharu Islam. Maka menurut Ita Mutiara Dewi (2008, 17) gagasan nasionalisme sering diadopsi dalam nasionalisme Islam yang artinya kesetiaan warga negara terhadap negara-bangsanya dianggap selaras dengan Islam meskipun masing-masing berada dalam wilayah negara-bangsa yang berbeda-beda.

Dalam sejarah Islam Abdul Fattah (2004, 106) menjelaskan nasionalisme tidak bisa lepas dari lahirnya Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*) yang oleh para pakar politik Islam sekaliber Montgomery Watt (1988) dan Bernard Lewis (1994) dianggap sebagai embrio lahirnya negara nasional atau *nation state* dan menempatkan Nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin negara dan tidak sekadar menjadi pemimpin agama. Pembentukan Piagam Madinah itu, tidak hanya dinikmati umat Islam, namun juga dari kaum Yahudi, Nasrani dan umat yang masih menyembah berhala.

Nasionalisme Indonesia menurut George McTurnan Kahin berakar pada tradisi Islam di Nusantara yang digerakkan dari pesantren (Bizawie 2016, 19). Nasionalisme hadir dari perjuangan ulama dan kiai di Nusantara untuk melawan penjajah yang menggerogoti kekayaan pribumi saat itu. Pesantren di sini yang dimaksud adalah pesantren yang diampu KH. Hasyim Asyari pendiri Nahdlatul Ulama (NU) yang menggelorakan spirit nasionalisme bernafaskan Islam. Para santri saat itu membuktikan nasionalismenya dengan mengangkat senjata mengusir penjajah.

Secara konseptual, ada beberapa pendapat tentang konsep nasionalisme menurut Hans Kohn (1985, 11). Pertama, Encyclopedia Britannica mendefinisikan nasionalisme sebagai keadaan jiwa, di mana individu merasa setiap orang memiliki kesetiaan keduniaan tertinggi pada negara kebangsaan. Kedua, Huszer dan Stevenson mendefinisikan

nasionalisme adalah yang menentukan bangsa mempunyai rasa cinta secara alamiah pada tanah air. Ketiga, International Encyclopedia of the Social Sciences mendefinisikan nasionalisme sebagai ikatan politik mengikat kesatuan masyarakat modern dan memberi pengabsahan terhadap klaim tuntutan kekuasaan. Keempat, nasionalisme merupakan faham kesetiaan tertinggi individu yang harus diserahkan pada negara kebangsaan.

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nasionalisme merupakan cinta kepada tanah air, negara, yang bernafaskan Islam dengan merangkul semua golongan. Nasionalisme lahir dari berbagai organisasi dan kelompok sejak masa penjajahan yang intinya ingin mengusir penjajah.

Meski secara historis pencetus nasionalisme memiliki ideologi berbeda, namun substansi nasionalisme saat ini harus ditegakkan. Tidak peduli apa agamanya, budaya, sukunya, warna kulit, semua bisa terangkul dalam bingkai nasionalisme karena spiritnya adalah kebangsaan, bukan kelompok dan agama tertentu. Nasionalisme hadir untuk menyatukan, memompa, meningkatkan spirit cinta kepada bangsa yang bisa menyatukan semua golongan.

2. Konsep Hubbul Wathan Minal Iman

Konsep nasionalisme memang digelorkan Sarekat Islam, Budi Utomo, dan lainnya, namun kedua organisasi ini sudah bubar. Saat ini yang masih bertahan adalah NU yang bisa dikatakan penerus nasionalisme bernafaskan Islam yang ramah. Gagasan cinta tanah air, nasionalisme, yang dikemas dengan idiom *Hubbul Wathan Minal Iman* tidak pernah lepas dari peran ulama dan kiai Nusantara khususnya NU. Secara bahasa, *hub* artinya cinta, *wathan* berarti tanah air (bangsa), *minal iman* berarti dari atau sebagian dari iman.

Konsep ini sangat terkenal dan banyak umat Islam yang gagal paham dengan idiom tersebut. Ada yang mengatakan itu ayat Alquran dan hadist. Padahal konsep itu adalah rumusan nasionalisme yang lahir dari Nusantara karena kondisi kebangsaan dan keagamaan sebelum kemerdekaan tahun 1945.

Konsep *Hubbul Wathan Minal Iman* tidak bisa lepas dari peran tokoh-tokoh, kiai dan santri NU. Bisa dikategorikan, sejarah munculnya

gagasan *Hubbul Wathan Minal Iman* dibagi dalam fase pra kemerdekaan dan setelah kemerdekaan sampai saat ini.

Pra Kemerdekaan

Sebelum merdeka, sebenarnya NU dan sejumlah ormas lain, baik yang modernis maupun sosialis sudah mengusung spirit nasionalisme. Namun secara konseptual, yang jelas-jelas mengusung konsep *Hubbul Wathan Minal Iman* adalah NU sebagai salah satu ormas Islam yang selalu mendukung nasionalisme.

Konsep *Hubbul Wathan Minal Iman* digagas pertama kali oleh kaum pesantren sebelum kemerdekaan, salah satunya KH. Abdul Wahab Chasbullah seorang sesepuh dan pendiri NU. Penguatan nasionalisme itu diamini Presiden Sukarno dengan usulan dan restu dari beberapa ulama dan kiai asli pribumi Indonesia yang sampai saat ini masih bisa dinikmati.

Dalam sejarahnya, sekitar tahun 1919, KH. Abdul Wahab Chasbullah bertemu tiap hari Kamis siang di Kota Surabaya dengan dua saudaranya sepupunya, Syekh Hasyim As'yarî dan HOS Cokroaminoto. Mereka mendiskusikan hubungan ajaran Islam dengan spirit kebangsaan atau nasionalisme. Kenyataan politik di bawah kolonialisme Belanda menyadarkan aktivis gerakan Islam dan gerakan nasionalis sebelum masa kemerdekaan. Kesadaran itulah lahir berbagai gerakan Islam, seperti NU dan Muhammadiyah yang memimpin kesadaran berbangsa melalui jaringan masing-masing. Nasionalisme di dini, dalam arti menolak penjajahan, pencarian jati diri sejarah masa lampau negeri sendiri. Syekh Hasyim Asyari menyadari secara kultural, gerakan Islam dan nasionalis berbeda satu dari yang lain, tetapi dari sudut ideologi berupa kebutuhan akan kemerdekaan adalah suatu bangsa (Bizawie 2016).

Tidak hanya berhenti di situ, KH. Abdul Wahab Chasbullah bersama Abdullah Ubaid, Mahfudz Siddiq dan Thohir Bakri juga mendirikan Syubbanul Wathan pada 1924. Kemudian, berganti menjadi Barisan Ansor Nahdlatul Oelama (BANOE) pada 1932, menjadi Ansor Nahdlatul Oelama (ANO) dan akhirnya menjadi Gerakan Pemuda (GP) Ansor sampai sekarang (Bizawie 2016). Sampai sekarang, organisasi ini masih konsisten mengawal nasionalisme tanpa harus meleburkannya menjadi negara Islam. Hal itulah yang harus menjadi spirit dalam mengimplementasikan cinta tanah air di NKRI ini.

Nahdlatul Wathan dan Syubbanul Wathan secara historis mengilhami berdirinya NU. Sehingga, yang komitmen sejak dulu mengawal NKRI adalah warga NU. Dalam sejarahnya, kiai-kiai dan ulama Nusantara melahirkan beberapa rumusan kebangsaan dan keagamaan yang dijadikan satu tanpa dipisah. Peran NU juga sangat erat kaitannya dengan perlawanan terhadap penjajah Belanda dan Jepang. Juga dalam pembentukan Pancasila sebagai dasar negara yang dulu dipengaruhi besar KH. Hasyim Asyari dan kiai lain saat Presiden Sukarno merumuskan Pancasila. Dari situlah nasionalisme lahir dan tidak bisa lepas dari peran ulama-ulama asli Nusantara.

Bahkan dari Syubbanul Wathan gagasan KH. Abdul Wahab Chasbullah yang lahir dari sayap Nahdlatul Wathan cikal bakal berdirinya NU, dulu juga sempat lahir beberapa sayap ormas. Pengabdian *Hubbul Wathan Minal Iman* tidak sekadar menjadi jargon, namun di internal NU diabadikan dalam lagu Syubbanul Wathan atau dikenal Yalal Wathan. Dalam lagu tersebut, meski mengalami beberapa revisi, namun intinya adalah membangkitkan spirit nasionalisme di NKRI.

Tahun 1934, KH. Abdul Wahab Chasbullah merumuskan lagu Syubbanul Wathan seperti di bawah ini:

Ya Lal Wathan Ya Lal Wathan Ya Lal Wathan

Hubbul Wathan minal Iman

Wala Takun minal Hirman

Inhadlu Alal Wathan

Indonesia Biladi

Anta 'Unwanul Fakhoma

Kullu May Ya'tika Yauma

Thomihay Yalqo Himama

Pusaka Hati Wahai Tanah Airku

Cintamu dalam Imanku

Jangan Halangkan Nasibmu

Bangkitlah Hai Bangsaku

Pusaka Hati Wahai Tanah Airku

Cintamu dalam Imanku

Jangan Halangkan Nasibmu

Bangkitlah Hai Bangsaku

*Indonesia Negriku
Engkau Panji Martabatku
Siapa Datang Mengancammu
Kan Binasa di bawah dulumu*

Lagu perjuangan kebangsaan dalam Bahasa Arab yang pernah diubah KH. Abdul Wahab Chasbullah sebagai berikut:

*Ya ahlal wathan, ya ahlal wathan
Hubbul wathan minal iman
Wahai bangsaku, wahai bangsaku.....
Cinta tanah air adalah bagian dari iman
Cintailah tanah air ini wahai bangsaku
Jangan kalian menjadi orang terjajah
Sungguh kesempurnaan dan kemerdekaan
Harus dibuktikan dengan perbuatan*

Lagu ini selalu dilantunkan pada pemuda dan pemuda di Nahdlatul Wathan sebelum mereka melakukan kegiatan belajar dengan tujuan menyuntik nasionalisme (Bizawie 2016). Akan tetapi, lagu yang dikumandangkan warga NU sampai sekarang adalah versi yang pertama di atas sebagai pemantik spirit nasionalisme.

Moesa (2007, p. 243) menyebutkan peran NU sangat strategis dan konsisten dalam mengawal nasionalisme. Terbukti, ada lima gerakan NU pada pra-kemerdekaan dan kiai-kiai NU sudah membuktikan nasionalismenya dengan melakukan lima gerakan. Pertama, sikap non-kooperasi dengan penjajah. Kedua, menolak pemerintah Belanda masuk Staat Van Orlog Bleg (SOB) yaitu sebuah instruksi mirip wajib militer. Ketiga, menjadi anggota Pembela Tanah Air (PETA) yang menjadi embrio lahirnya TNI. Keempat, gigih melakukan perlawanan penjajahan secara kultural. Bahkan, kiai NU saat itu sampai mengharamkan orang Islam menggunakan celana, dasi, jas karena menyerupai tradisi Belanda. Kelima, ikut merumuskan Piagam Jakarta dan Pancasila yang dipresentasikan KH. Wahid Hasyim.

Setelah rumusan ini dikeluarkan, spirit nasionalisme para ulama dan kiai saat itu juga bertahan. Buktinya, semua aktivitas NU saat itu tidak pernah bertentangan dengan negara. Dalam hal ini, justru NU

selalu membangkang dan melawan penjajah dengan berbagai gerakan dan dinamikanya, baik pra maupun setelah kemerdekaan.

Setelah Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, peran NU dalam menegakkan spirit *Hubbul Wathan Minal Iman* juga tidak berhenti seketika. Artinya, dalam hal ini NU komitmen mengawal NKRI dan tidak pernah menginginkan NKRI menjadi negara Islam. Maka, NU selalu konsisten terhadap NKRI dan mengimplementasikan *Hubbul Wathan Minal Iman*.

Usai Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, NU juga tetap konsisten menjaga keutuhan NKRI dengan beberapa bukti. Salah satunya adalah perang dalam tragedi Surabaya yang membuat NU ikut memperjuangkan Indonesia yang baru saja mendeklarasikan proklamasi kemerdekaannya.

Pada tanggal 22 Oktober 1945, delapan minggu setelah Indonesia merdeka, terjadi perang di Surabaya. Untuk memobilisasi dukungan umat Islam, KH. Hasyim Asyari mengeluarkan fatwa untuk tetap mempertahankan NKRI. Pertama, Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus wajib dipertahankan. Kedua, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dijaga dan ditolong. Ketiga, musuh Republik Indonesia yaitu Belanda yang kembali ke Indonesia dengan bantuan Sekutu (Inggris) pasti akan menggunakan cara-cara politik dan militer untuk menjajah kembali Indonesia. Keempat, umat Islam terutama anggota NU harus mengangkat senjata melawan Belanda dan Sekutu yang ingin menjajah Indonesia kembali. Kelima, kewajiban ini merupakan perang suci (jihad) dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tinggal di radius 94 kilometer. Sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut harus membantu secara material terhadap mereka yang berjuang (Khuluq 2009, 143–44).

Hal inilah menjadi bukti komitmen dan bentuk nasionalisme yang digelorakan NU. Nasionalisme kaum santri dan kiai dulu tentu tidak bisa diremehkan karena memiliki sejarah panjang dari pra kemerdekaan dan setelah kemerdekaan untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Ideologi nasionalisme tersebut dibuktikan dengan gerakan santri yang antikolonial, mereka juga terdorong ikut perang dengan tergabung dalam Hizbullah dan Sabilillah yang dibentuk pada zaman Jepang.

Sementara itu, Moesa (2007) menjelaskan ada beberapa peran NU menggelorakan nasionalisme setelah kemerdekaan. Pertama, fatwa perang suci (jihad) pada 22 Oktober 1945 melawan tentara sekutu dan Belanda yang menyerang Kota Surabaya. Kedua, konsisten dengan bentuk negara Pancasila sehingga menilai Negara Islam (*Dar Al-Islam*) sebagai tidak sah dan Kartosuwiryo dinyatakan sebagai pemberontak (*bughat*). Ketiga, memberi gelar kepada Soekarno sebagai *Wali Al-arm Adh-dharuri Bi Asya-syaukah*. Substansi gelar ini adalah pernyataan sahnya Soekarno sebagai Presiden RI secara darurat meskipun tanpa pemilu. Keempat, bersedia duduk dalam kabinet NASAKOM. Kelima, pada 1 Oktober 1946 menuntut pemerintah agar membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai partai terlarang. Keenam, memelopori penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi ormas yang diputuskan Munas Alim Ulama NU tahun 1983 di Situbondo Jawa Timur.

Dulu, pada suatu waktu, Presiden Sukarno pernah bertanya kepada KH. Abdul Wahab Chasbullah. “Pak Kiai, apakah nasionalisme itu ajaran Islam?” dan Kiai Wahab menjawab tegas, “Nasionalisme yang ditambahi *bismillah* itulah Islam” (Zuhri 1981, 182). Artinya, nasionalisme yang digaungkan kaum pribumi dengan spirit Islam sudah mewakili Islam sebagai agama. Jadi di sini, Indonesia menjadi negara bernafaskan Pancasila yang di dalamnya menampung spirit Islam dan tidak perlu mengubah dasar negaranya.

KH. Abdul Wahab Chasbullah juga mendirikan sekolah Islam bernama Nahdlatul Wathan untuk membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan umat Islam. Nahdlatul Wathan menjadi kawah candradimuka yang menggembelng pemuda Islam untuk belajar dan menggelorakan cinta tanah air dalam melawan penjajah. Gagasan *Hubbul Wathan Minal Iman* tidak bisa terlepas dari peran dan perjuangan KH. Abdul Wahab Chasbullah yang dikonsepsi dari spirit Islam dan kebangsaan. Dirumuskan dengan Bahasa Arab, tujuannya agar Belanda tidak mengetahui maknanya. Sebab, jika tahu maknanya, maka Belanda akan melawan kaum pesantren saat itu.

Tidak hanya diabadikan dalam bentuk lagu, membumikan *Hubbul Wathan Minal Iman* juga digerakkan lewat gerakan terstruktur. Menurut Amin (1995, 134–35) untuk menggerakkan spirit nasionalisme, Syubbanul

Wathan sebagai sayap Nahdlatul Wathan mendirikan sayap di sejumlah daerah. Seperti Madrasah Akhul Wathan (saudara setanah air) di Semarang, Far'ul Wathan (cabang tanah air) di Gresik dan Malang, Hidayatul Wathan (petunjuk tanah air) di Jombang dan Jagalan, Ahlul Wathan (warga tanah air) di Wonokromo dan Khitabul Wathan di Pacarkeling.

Dari penjelasan Zainul Milal Bizawie (2016), Khuluq (2009), Moesa (2007), Zuhri (1981), Amin (1995), dapat disimpulkan bahwa *Hubbul Wathan Minal Iman* merupakan gagasan ulama NU tentang nasionalisme dengan penggabungan spirit Islam dan kebangsaan. Jika dulu *Hubbul Wathan Minal Iman* sebagai bentuk nasionalisme yang dibuktikan dengan melawan penjajah, namun sekarang lebih pada mempertahankan kemerdekaan yang bisa diimplementasikan dalam pendidikan Islam. Pasalnya, spirit *Hubbul Wathan Minal Iman* awalnya juga telah diterapkan di sekolah Islam bernama Nahdlatul Wathan yang didirikan KH. Abdul Wahab Chasbullah.

Penjajah sekarang tidak lagi melawan penjajah dari luar, melainkan dari negeri ini sendiri dengan banyaknya ormas yang melawan dan ingin menegakkan negara Islam, khilafah dan menggembosi nasionalisme sekaligus mengganti dasar negara. Oleh karena itu, generasi muda harus ditanamkan dan didoktrin untuk cinta pada bangsanya sendiri, bukan melawan bangsanya.

3. Fenomena Kelompok Antinasionalisme

Kelompok antinasionalisme, transnasional atau yang menolak empat pilar kebangsaan (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945) sudah ada sejak dulu. Di era pra dan setelah Indonesia merdeka, mereka selalu timbul dan tenggelam. Mereka lahir dari berbagai dinamika politik, sosial, agama dan hukum. Ada aliran yang menggabungkan spirit nasionalisme dengan Islam, ada pula gerakan pemurnian Islam yang mengembalikan dasar-dasar kehidupan pada Alquran dan hadist. Sehingga, mereka sangat anti dengan nasionalisme karena tidak ada dalilnya di Alquran.

Menurut Dhofier (2011, 231), umat Islam modern berpendapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang murni, kaum muslimin harus mendasarkan pengetahuan dan amalannya hanya kepada

Alquran dan hadist. Sebaliknya, para kiai berpendapat bahwa kitab-kitab yang berisi ulasan-ulasan dan tafsir Alquran dan hadist yang ditulis iman-iman tertentu dari sejak nabi meninggal sampai sekarang, dan menjadi dasar bagi pemahaman amalan ajaran-ajaran Islam.

Gerakan pembaharu Islam yang muncul di Indonesia sebenarnya bisa berjalan baik jika tidak mempertentangkan antara Islam dan nasionalisme atau kebangsaan. Sebab, selama ini bagi mereka yang antinasionalisme, spirit nasionalisme dianggap kafir dan tidak sesuai dengan Alquran dan hadist sebagai sumber utama agama Islam.

Gagasan pemurnian Islam itu sebenarnya berawal dari gerakan pembaruan di Mesir sekitar abad ke 19 yang ingin memisahkan antara Islam dan peradaban Barat. Salah satunya adalah Muhammad bin Abd al-Wahhab (1701-1793) yang kemudian dikenal dengan gerakan Wahabiyah. Gerakan Wahabi ini menolak peradaban Barat dan ingin memurnikan Islam dan kembali pada Alquran dan hadist (Sitompul 2010).

Gerakan Wahabi di Indonesia belakangan justru sangat berlebihan dan justru lebih pada aspek politiknya, bukan substansi agamanya. Faham dan gerakan *takfiri* (mengafirkan), *tasyrik* (mensyirikkan), *tajhil* (menjahiliyahkan), *tanfik* (memunafikkan) dan *tabdi'* (mebidahkan) saat ini makin merajalela dan digelorakan mereka yang pro terhadap negara Islam, khilafah dan anti terhadap Pancasila, nasionalisme dan NKRI. Hal itu menunjukkan masyarakat masih dalam fase “puber beragama”. Sangat jelas, mereka belum dewasa dalam beragama karena belum mengimplementasikan substansi agama. Mereka masih memandang bungkus, formalitas dan belum mengutamakan substansi agama yang sangat terbuka, toleran dan tidak kaku.

Mereka belum bisa memahami mana wilayah yang harus dimurnikan, dan mana wilayah yang harus bercampur dengan budaya dan tradisi. Akibat kaku dan ingin menjadi “pewaris nabi” yang sebenarnya, maka semua ajaran Nabi Muhammad Saw ditelan mentah-mentah dan mereka tidak bisa membedakan mana yang Islam dengan tafsir Islam, mana yang Islam dan budaya Arab, dan mana yang *mahzah* (ibadah wajib) dan mana yang ibadah *muamalah* (sosial-kemanusiaan). Lantaran memahami secara permukaan inilah mereka mudah menyalahkan dan mengklaim paling benar sendiri dan sangat anti dengan nasionalisme. Akhirnya,

mereka bernarasi keras, suka mengafirkan dan ujungnya melawan dengan terorisme dengan label jihad yang salah kaprah.

Hal semacam itu harus dilawan dan ditertibkan secara undang-undang karena mereka jelas-jelas membahayakan negara. Di di tahun 1960-an, misalnya, ada penolakan keras terhadap organisasi yang ingin mendirikan negara Islam maupun Parpol Islam. Salah satunya adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang berdiri pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta. Partai yang didirikan dengan tujuan sebagai partai politik yang dimiliki umat Islam dan sebagai partai penyatu umat Islam dalam bidang politik. Masyumi pada akhirnya dibubarkan Soekarno tahun 1960 dikarenakan tokoh-tokohnya dicurigai terlibat dalam gerakan pemberontakan dari dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Salah satu tokoh yang menolak keras ideologi Masyumi adalah Nurcholis Madjid (1939-2005). Cak Nur menentang gagasan Masyumi yang ingin mendirikan “parpol Islam” dan “negara Islam”. Lewat gagasan “Islam *yes*, Partai Islam *no!*”. Cak Nur secara tegas tidak ingin menggabungkan masalah duniawi dengan agama. Cak Nur berpendapat, agama dan negara bukan hal sakral, *ilahiyah*, maka tidak perlu dan bisa digabungkan.

Selain Masyumi, sebenarnya banyak sekali organisasi yang antinasionalisme. Pemerintah beberapa waktu lalu membubarkan ormas Islam yang jelas-jelas antinasionalisme. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 19 Juli 2017. Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ada beberapa alasan pembubaran HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan HTI telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Ketiga, aktivitas HTI telah menimbulkan benturan di

masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI (Movanita 2017).

Selain HTI, pemerintah juga menduga masih ada sejumlah ormas yang antinasionalisme dan NKRI. Mulai dari Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS), Jamaah Ansarut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), Front Pembela Islam (FPI) dan lainnya (Amany 2017). Adanya kelompok yang mempertentangkan agama dan negara sebenarnya sudah ada sejak dulu. Kelompok yang pro terhadap nasionalisme kebanyakan memang lahir dari pribumi, semial ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Akan tetapi, munculnya ormas-ormas yang mengafirkan nasionalisme tumbuh karena faham mereka terlalu tekstual, ingin memurnikan ajaran Islam dan kebanyakan lahir dari luar, bukan produk asli Nusantara.

Ibarat sebuah kereta, faham keagamaan yang terlalu kaku dan tekstual itu sudah jauh keluar dari relnya. Artinya, memahami agama masih dalam tataran tekstual dan formal, padahal memahami agama harus kontekstual, intertekstual bahkan supratekstual. Apalagi, sekularisasi masih dimaknai sekadar mengawinkan agama dan kebangsaan atau nasionalisme. Akhirnya, pola pemahaman seperti ini mendorong pendirian negara Islam, khilafah dan menolak nasionalisme dan Pancasila.

Dari penjelasan Dhofier (2011), Sitompul (2011), data Movanita (2017), dan Amany (2017), membuktikan banyak ormas atau kelompok yang tegas menolak nasionalisme. Mereka harus diwaspadai dan harus dibina pemerintah untuk tidak keluar dari koridor Pancasila. Hadirnya kelompok-kelompok itu justru semakin memperkeruh kondisi Indonesia. Menjadi Islam, Hindu, Budha, Kristen, tidak berarti tidak bisa menjadi nasionalis, justru, menjadi religius itu bisa berbarengan dengan menjadi nasionalis.

Ciri Islam yang menonjol adalah keadilan, dan Islam tidak bertujuan mendirikan politik atau suatu negara, begitu juga dengan agama lain. Dalam Pancasila, sudah ada substansi agama bahkan sudah sangat religius karena mengandung inti dari ajaran agama. Jika Indonesia diubah menjadi “negara Islam” justru tidak bisa *survive* tanpa bekal nasionalisme. Sebab, NKRI sudah memiliki Pancasila yang di dalamnya memuat unsur religi yang sangat terbuka, modern, moderat dan plural.

4. Karakter Nasionalisme dalam Pendidikan Islam

Tidak ada bangsa besar, maju, kuat dan kokoh tanpa adanya nasionalisme. Meskipun pemeluk agama di negara tersebut beragam suku, agama dan budaya, jika nasionalisme menjadi jimat dalam bernegara dan juga beragama, tentu tidak ada gangguan yang memperkeruh kondisi negara.

Karakter nasionalisme harus ditanamkan sejak dini, terutama di dalam pendidikan Islam yang sesuai dengan spirit *Hubbul Wathan Minal Iman* dan juga sesuai dengan kurikulum yang sudah diatur pemerintah, baik melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikristekdikti), Kementerian Agama (Kemenag). Artinya, karakter nasionalisme, cinta tanah air dan spirit *Hubbul Wathan Minal Iman* harus dikuatkan dalam lembaga pendidikan formal. Hal itu tidak lain untuk menyiapkan generasi bangsa yang nasionalis, religius, plurian dan toleran.

Nasionalisme merupakan manifestasi kecintaan dan kesetiaan tertinggi kepada tanah air, negara, dan bangsa merupakan modal dasar bagi pembentukan negara, dan karakter bangsa. Nasionalisme yang menjadi dasar pembentukan negara dan karakter bangsa merupakan nasionalisme yang menghargai pluralisme, humanisme, dan menjunjung tinggi hak hak asasi manusia (Murod 2011). Konsep nasionalisme seperti itulah yang disebut sebagai nasionalisme positif bukan nasionalisme sempit.

Nasionalisme seperti pendapat Murod (2011) merupakan fenomena abad modern walaupun akar-akar nasionalisme sudah ada sejak Yunani kuno dan mencapai puncaknya pada abad ke-20. Sedangkan di Indonesia, nasionalisme dapat kita temukan pada organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Nahdlatul Ulama. Para *founding fathers* kita juga selalu mendengungkan nasionalisme dalam rangka perjuangan untuk meraih kemerdekaan maupun dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari rongrongan Belanda.

Kecintaan terhadap tanah air merupakan ajaran Islam yang sangat mendasar sejajar dengan kecintaan terhadap agama. Bermula dari itulah maka kita dapat saksikan bagaimana para ulama, kiai dan guru ngaji sangat gigih menentang kolonialisme Belanda, sampai mereka mengeluarkan fatwa haram memakai jas dan dasi karena menyerupai penjajah yang kafir.

Dengan dasar pandangan yang seperti itu, dapat dipahami bahwa KH Hasyim Asyari sampai mengeluarkan resolusi jihad pada tahun 1945 dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Kecintaan terhadap tanah air inilah yang mampu membuat orang-orang Islam lentur terhadap *local wisdom* (kearifan lokal) sehingga bahu membahu dengan komponen bangsa lain dalam mendirikan NKRI.

Dalam konteks nasionalisme Indonesia dan hubungannya dengan Islam kita dapat mengambil kasus NU. Pertama, NU dalam keputusan ijtihad politiknya dalam muktamar di Banjarmasin tahun 1936 mengambil keputusan bahwa negara dan tanah air Indonesia yang masih dijajah Belanda wajib dilestarikan berdasarkan hukum fikih Islam. Indonesia saat mendapat kemerdekaan bukan berbentuk negara Islam (Darul Islam) atau negara perang (Darul Harb) melainkan negara damai (Dar'as Shulh). Kedua, resolusi jihad yang dilontarkan KH Hasyim Asyari pada 22 Oktober 1945 yang isinya "Kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan, RI sebagai satu-satunya pemerintahan yang wajib dibela dan dipertahankan, warga NU wajib mengangkat senjata melawan penjajah Belanda". Ketiga, memberi gelar pemegang kekuasaan yang sah secara de facto dalam keadaan darurat kepada presiden Soekarno dalam menumpas pemberontakan yang terjadi di mana-mana. Keempat, keputusan menerima asas tunggal Pancasila dan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah final sesuai dengan muktamar NU ke 27 di Situbondo tahun 1984. Kelima, keputusan NU tentang wawasan kebangsaan dalam muktamar NU ke 29 di Tasikmalaya pada tahun 1994 yang isinya antara lain: NU memandang bahwa nasionalisme tidak bertentangan dengan universalisme Islam bahkan nasionalisme bisa menjadi sarana untuk memakmurkan bumi Allah sebagai amanat-Nya dan sejalan dengan budaya yang dimiliki oleh bangsa, pluralitas yang menyangkut kemajemukan agama, etnis, budaya, dan sebagainya adalah merupakan sunnatullah dan rahmat dalam sejarah Islam, memberikan jaminan bertoleransi, kebersamaan, keadilan, dan kejujuran.

Dari keputusan muktamar NU itu, dapat ditarik simpulan bahwa NU telah menunjukkan sikap nasionalisme sejak zaman penjajahan Belanda, karena hal tersebut dilandasi ajaran Ahlussunnah Waj Jamaah yang menganut prinsip tawassut (moderat), tawazun (keseimbangan), ta'adul (keadilan), tasamuh (toleransi) (Murod 2011).

Konsep *Hubbul Wathan Minal Iman* yang dicetuskan NU atau nasionalisme terdapat dalam pendidikan Pancasila dan juga pendidikan karakter. Hal itu sesuai dengan amanat Munas Ulama NU pada tahun 1983 yang menerima deklarasi Hubungan Islam dan Pancasila. Bagi NU, Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila merupakan bentuk final membentuk negara oleh seluruh bangsa Indonesia.

Ada beberapa hubungan Islam dan Pancasila yang selaras yang seharusnya diimplementasikan dalam pendidikan Islam, baik di tingkat MI, MTs, MA maupun perguruan tinggi Islam seperti STAIN, IAIN maupun UIN dan perguruan tinggi Islam swasta lainnya.

Pertama, Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, bukan sebagai agama. Kedua, sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan tauhid menurut konsep keimanan dalam Islam. Ketiga, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi hubungan manusia dengan Allah dan antarmanusia. Keempat, penerimaan dan pengamalan Pancasila menjadi wujud umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat. Kelima, konsekuensi sikap itu, umat Islam (NU) wajib mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila (Wahid 2010, 80).

Karakter nasionalisme hakikatnya termaktub dalam nilai-nilai pada Pancasila. Pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menjiwai sila-sila yang lainnya. Indonesia menjadi negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, bukan negara ateis, bukan pula negara kebangsaan yang chauvinistic, congkak, sombong. Namun negara kebangsaan yang mendasarkan pada moral keagamaan dan kemanusiaan.

Kedua, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Karakter sila ini menganjurkan negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini menganjurkan Indonesia untuk hidup bersama-sama dalam bingkai negara yang berupa suku, ras, kelomok, golongan maupun agama. Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Sila ini mendeskripsikan hakikat negara adalah penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Artinya, Indonesia adalah negara kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan (Kaelan 2016).

Dalam pendidikan Islam, konsep nasionalisme yang sudah ada dalam nilai-nilai Pancasila di atas bisa diterapkan dengan pembelajaran apa saja, terutama dalam mata pelajaran/kuliah Kewarganegaraan, PPKN dan lainnya. Hal itu bisa menggunakan metode ceramah, diskusi, analisis kasus serta tanya jawab. Menurut Kaelan (2016), materi pendidikan Pancasila bisa dikembangkan ke arah pemahaman karakteristik filsafat Pancasila, diperbandingkan dengan ideologi, filsafat bangsa lain, serta pemahaman terhadap esensi Pancasila, termasuk nasionalisme.

Pada puncaknya, pendidikan dengan label “agama” maupun “umum” yang melekat pada lembaganya, harus melahirkan generasi Pancasila, nasionalis, dan juga memiliki karakter cinta pada bangsa. Hal itu senada dengan tujuan pendidikan menurut KH. Wahid Hasyim, yaitu memuliakan martabat manusia dan meningkatkan sumber dayanya sebagai manusia. Ini penting, karena rakyat sepertinya kurang sadar jika dirinya dijajah (Rifai 2009, 75). Di sinilah pentingnya pendidikan harus menanamkan karakter nasionalisme untuk bisa menangkal penjajahan dari dalam dan luar.

Di dalam kurikulum kita, yang diterapkan lembaga pendidikan Islam, dari jenjang MI, MTs, MA dan perguruan tinggi Islam, seharusnya mengacu pada kurikulum yang diterapkan pemerintah. Fakta di lapangan membuktikan untuk jenjang MI, MTs dan MA masih ada yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Namun, pemerintah sendiri menarget semua jenjang harus menerapkan Kurikulum 2013 sampai tahun 2020 mendatang.

Pemerintah melalui Kemendikbud telah melakukan banyak revisi tentang pendidikan karakter yang di dalamnya ada “karakter nasionalisme” atau cinta tanah air. Pada Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPPK) tahun 2017, pemerintah sudah mengeluarkan ketentuan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 yang direvisi tahun 2017. Beberapa hal yang dikuatkan dari Kurikulum 2013 hasil revisi tahun 2017 yaitu (1) penguatan pendidikan karakter, (2) penguasaan literasi, dan (3) penguatan berpikir tingkat tinggi atau *high order thinking*.

Sementara untuk karakter yang diperkuat dititikberatkan pada beberapa aspek, yaitu (1) religiusitas, (2) nasionalisme, (3) kemandirian, (4) gotong royong, dan juga (5) integritas. Sedangkan penguasaan literasi

ditekankan pada literasi abad 21 yang terangkum dalam 4C, yaitu (1) *creative*, (2) *critical thinking*, (3) *communicative*, dan (4) *collaborative*. 4C tersebut di antaranya sudah mencakup beberapa kompetensi berpikir tingkat tinggi.

Dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah juga ada poin penguatan karakter dengan melaksanakan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi aktivitas keagamaan meliputi madrasah diniyah, pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, *retreat*, baca tulis Alquran dan kitab suci lainnya (Kemendikbud 2017, 6). Revisi Kurikulum 2013 tersebut dalam implementasinya melalui (1) penambahan dan intensifikasi kegiatan yang berorientasi mengembangkan karakter siswa, (2) menambah dan mengatur ulang alokasi waktu belajar siswa di sekolah dan luar sekolah, dan (3) menyelaraskan dan menyesuaikan tugas pokok guru, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan fungsi Komite Sekolah (KS) dengan kebutuhan gerakan penguatan pendidikan karakter.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), ada beberapa karakter bangsa Indonesia yang harus diajarkan dan dikuatkan kepada anak-anak kita. Poin karakter nasionalisme juga dikuatkan dalam Perpres No. 87 tahun 2017 tersebut.

Dalam Pasal 3 Perpres No. 87 tahun 2017 disebutkan PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab (Setkab 2017, 4). Langkah pemerintah untuk menjaga nasionalisme sebagai ruh berbangsa dan bernegara makin taji karena dalam Perpres No. 87 tahun 2017 tersebut juga mendukung lembaga pendidikan untuk menguatkan nasionalisme. Salah satunya dengan penguatan karakter “semangat kebangsaan” dan “cinta tanah air”.

Dari penjelasan Abdul Choliq Murod (2011), Wahid (2010), Kaelan (2016), Rifai (2009), Kemendikbud (2017), dan Setkab (2017), dapat disimpulkan bahwa karakter nasionalisme menjadi jalan untuk menyiapkan generasi bangsa yang tidak mengkhianati bangsanya sendiri.

Karakter itu akan melahirkan generasi yang mampu menerima perbedaan, baik dari segi bahasa, budaya, agama, warna kulit dan lainnya. Pemerintah juga memperkuat nasionalisme melalui Program Penguatan Karakter (PPK) yang di dalamnya memuat unsur penguatan karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Maka dari itu, hukumnya wajib bagi lembaga pendidikan Islam menerapkan karakter nasionalisme yang dimasukkan ke dalam pembelajaran, baik melalui standar kompetensi, kompetensi dasar, atau di dalam mata pelajaran dan muatan karakter yang dimasukkan dalam tujuan pembelajaran. Hal itu menjadi urgen, karena di era milenial ini, “nasionalisme” di Indonesia seolah-olah menjadi barang mahal. Sebab, interaksi dengan pemeluk agama lain selalu dicurigai, toleran dianggap berafiliasi, plural dianggap kafir dan lainnya.

Hal itu membuktikan masih dangkalnya masyarakat memahami substansi agama. Padahal, hal itu wujud nasionalisme dan substansi agama yang sebenarnya, karena menjadi rahmat bagi semua alam dan makhluk. Semua lembaga pendidikan Islam harus menguatkan karakter cinta tanah air, semangat kebangsaan atau nasionalisme yang senada dengan spirit *Hubbul Wathan Minal Iman*.

5. Urgensi Menjaga Nasionalisme

Indonesia tidak akan bertahan menjadi negara multikultur, plural, heterogen, bhineka, dan damai jika penduduknya tidak memegang teguh empat pilar kebangsaan. Kunci dari empat pilar kebangsaan itu adalah nasionalisme. Maka menjaga marwah dan substansi nasionalisme hukumnya wajib bagi setiap orang yang lahir dan besar di Indonesia. Nasionalisme yang dimaksud tidak hanya dalam konteks budaya, namun juga nasionalisme dalam agama, baik itu Islam, Hindu, Kristen, Budha dan lainnya.

Nasionalisme di Indonesia dengan di luar negeri memang beda. Faham nasionalisme atau kebangsaan ini dapat diterima masyarakat Indonesia setelah diberi makna dan muatan yang berbeda dengan nasionalisme Barat. Nasionalisme yang diterima di Indonesia, adalah nasionalisme tauhid/Islam dan kebudayaan, menerima rasa hidupnya sebagai wahyu, dan menjalankan rasa hidupnya itu sebagai suatu bakti,

memberi rasa cinta pada lain bangsa sebagai lebar dan luasnya udara, yang memiliki tempat segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang dalam roch, menjadi “perkakas Tuhan,” hidup dalam ruh nasionalisme yang sama dengan kemanusiaan.

Nasionalisme seperti ini dikenal dengan nasionalisme Timur yang digagas oleh Mahatma Ghandi, Rabendranath Tagore, Mustafa Kamil, Jose Rizal, dan Dr. Sun Yat Sen. Nasionalisme yang diterapkan di Indonesia adalah nasionalisme Timur yang disesuaikan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang berkembang di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia merupakan nasionalisme antiimperialisme, kolonialisme, kapitalisme, chauvinisme, individualisme dan juga liberalisme, serta nasionalisme Barat lainnya (Abuddin Nata 2016, 4).

Spirit *Hubbul Wathan Minal Iman* mendasari bahwa menjadi nasionalis justru menjadi representasi muslim yang kafah dalam beragama, bukan sebaliknya. Belakangan, adanya kelompok yang mempertentangkan nasionalisme dan spirit beragama justru mengingkari substansi agama itu sendiri, sebab, tidak ada yang menyuruh pemeluknya melawan, apalagi mengganti dasar negara.

Kunci utamanya sebenarnya hanya satu, yaitu *Hubbul Wathan Minal Iman*. Artinya, mencintai NKRI sudah mencakup mencintai semua hal dan itu sudah sangat “islami”. Mulai dari cinta agama, negara, suku, bahasa, budaya dan semuanya. Spirit cinta tanah air memang urgen dan harus dipertahankan. Nasionalisme dan Islam adalah satu kesatuan untuk melawan penjajah, begitu pula dengan agama lain. Perjuangan melawan penjajah dan melawan pertarungan ideologi atau asas dalam negeri sudah ketinggalan zaman jika memisah-misahkan antara nasionalisme dan Islam, nasionalisme dengan Kritten, Hindu dan lainnya. Padahal, penyatuan spirit Islam dan nasionalisme sejak dulu terbukti ampuh untuk mengusir penjajah.

Menurut (Mintaredja 1972, 55) zaman perjuangan kemerdekaan, aspirasi Islam dan nasionalisme adalah senjata ampuh melawan penjajah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Sebab, zaman berubah pesat, musuh bangsa ini juga berbeda. Bahkan, Sukarno (1901-1970) pernah menyatakan “*perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.*” Benar

adanya, kita sampai detik ini disibukkan bertikai dan intrik dengan saudara sendiri. Padahal, pertikaian selalu destruktif, menyakitkan dan puncaknya kehancuran. Para penjajah juga cerdas, saat ini melakukan kembali politik adu domba atau *divide et impera* yang tidak disadari publik.

Dari pendapat Abuddin Nata (2016), Mintaredja (1972) dapat disimpulkan menjaga ruh nasionalisme sangat urgen karena nasionalisme sejak zaman penjajah terbukti ampuh bisa menggerakkan masyarakat, kiai dan santri untuk mengusir penjajah. Nasionalisme yang didasari *Hubbul Wathan Minal Iman* juga merepresentasikan warga negara yang ramah. Jika dilaksanakan serius, maka akan melahirkan generasi yang *tawassut* (moderat), *tawazun* (seimbang), *ta'adul* (adil) dan *tasamuh* (toleran).

Jika dulu adu domba berbasis strategi politik, militer, dan ekonomi, namun sekarang yang diadu domba adalah para ulama, kiai, dan ormas Islam. Para kiai diadu domba dengan kiai, ulama dan ormas Islam dibenturkan dengan ulama dan ormas yang lain. Mereka yang seharusnya bersatu namun justru berseteru karena penjajahnya dari negeri sendiri.

Orang yang sudah punya modal cinta tanah air pasti mau melakukan apa saja ketika bangsanya diganggu. Sebab, sifat dasar manusia adalah cinta dan kasih sayang. Cinta merupakan “teknologi batin” yang bisa menggerakkan fisik manusia melakukan kebaikan.

C. Simpulan

Karakter nasionalisme dan *Hubbul Wathan Minal Iman* yang didesain melalui Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) harus dimaksimalkan lembaga pendidikan Islam untuk mencetak generasi yang setia kepada Indonesia. Hal itu menjadi cara strategis untuk menghalau lahirnya generasi antinasionalisme, faham dan aliran radikal yang mengancam keutuhan Indonesia. Nasionalisme memang bukan segalanya, namun keutuhan negara yang di dalamnya ada suku, bahasa, budaya dan agama berawal dari sana. Tanpa nasionalisme, Indonesia akan mudah dijajah dan dihancurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata. 2016. *Islam Dan Kebangsaan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Amany, Tsamara. 2017. "Ini Dia 6 Ormas Yang Harus Dibubarkan Pemerintah." *redaksiindonesia.com*.
- Amin, M. Masyhur. 1995. *Dinamika Islam: Sejarah Transformasi Dan Kebangkitan*. Yogyakarta: LKPSM.
- Bizawie, Zainul Milal. 2016. *Masterpiece Islam Nusantara Sanad Dan Jejaring Ulama-Santri (1830-1945)*. Tangerang: Pustaka Compass.
- Dewi, Ita Mutiara. 2008. "Nasionalisme Dan Kebangkitan Dalam Teropong." *Mozaik Vol.3*: 17.
- Dhofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. 8th ed. Jakarta: LP3S.
- Fattah, Abdul. 2004. *Kewargaan Dalam Islam: Tafsir Baru Tentang Konsep Umat*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat.
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kemendikbud. 2017. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah*. Jakarta.
- Khuluq, Lathiful. 2009. *Fajar Kebangunan Ulama (Biografi KH. Hasyim Asya'ri)*. V Juli 200. ed. Muh. Shaleh Isre. Yogyakarta: LKiS.
- Kohn, Hans. 1985. *Nasionalisme, Arti Dan Sejarahnya*. IV. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mintaredja, Moh. Sjafa'at. 1972. *Islam Dan Politik, Islam Dan Negara Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: PP. PMI.
- Moesa, Ali Maschan. 2007. *Nasionalisme Kiai*. Yogyakarta: LKiS.
- Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. 2017. "HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah." *kompas.com*.

- Murod, Abdul Choliq. 2011. "Nasionalisme Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Sejarah CITRA LEKHA Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro*. Vol. XVI: 45.
- Poespoprodjo, W. 1984. *Jejak-Jejak Sejarah 1908-1926*. Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Rifai, Mohammad. 2009. *Wahid Hasyim (Biografi Singkat 1914-1953)*. ed. Meitasandra Shanty. Jogjakarta: Garasi.
- Setkab. 2017. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)." Indonesia.
- Sitompul, Einar Martahan. 2010. *NU Dan Pancasila*. ed. Ahmala Arifin. Yogyakarta: LKiS.
- Wahid, Sholahudin. 2010. *Nahdlatul Ulama (Dinamika Ideologi Dan Politik Kenegaraan)*. ed. Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzili. Jakarta: Kompas.
- Yatim, Badri. 1999. *Soekarno, Islam Dan Nasionalisme*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Zuhri, Saifuddin. 1981. *Sejarah Kebangkitan Islam Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: PT. Alama'arif.